

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN PASAR RAKYAT TELUK  
KUANTAN OLEH DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**YOGI FEBRI WANDA  
&  
FEBRI YULIANI**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Km, 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru. 28293 Telp/Fax  
(0761) 63277  
Jalan Purwodadi gang SMK 4 Tampan, Pekanbaru.  
yogifebriwanda@rocketmail.com Telp: (085271371119)

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the changes in the organization environment, both external and internal environment in the Pasar Rakyat Teluk Kuantan management. Furthermore, by referring to the strengths and weaknesses of factors, both external and internal environment, identified the strategic issues of concern facing the organization so as to formulate a good strategy in the management of the Pasar Rakyat Teluk Kuantan and improving employee performance. Descriptive method with qualitative approach, data and qualitative information to describe the state or condition being studied systematically, real and accurate as it happens on the field is focused on the formulation of policy strategies in carrying out the task of managing the Department of Pasar Rakyat Teluk Kuantan bay so that revenue can be optimized retribution. The observed phenomenon is internal and external organizational environment. Data collection techniques with methods of documentation, in-depth interviews and direct observation. Analysis of the data using a model of interaction analysis and SWOT analysis to strategic issues of concern, namely: 1. Low ability and skills of employees, 2. Lack of strategic steps, 3. Unclear supervisory procedures, 4. lack of law enforcement. To respond to these issues in the drafting of the strategy as follows: Improved quality through education and courses; understanding and dissemination of the organization's mission; Improvements to workplace procedures; Extension and dissemination of the rights and obligations of the merchant with a persuasive approach and repressive; Improved quality of service; Commitment / understanding with all parties; Reviewing existing regulations.

Keywords: Analysis, Market Management, Strategy.

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai penyempurna dari Undang-Undang No.22 tahun 1999, Menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah Sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya yang berarti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Seiring dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Sejalan dengan kebijakan dalam bidang otonomi daerah dituntut untuk dapat menggali sumber dana sendiri karena peran pemerintah pusat akan semakin dikurangi. Pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri sebenarnya bersentral kepada kemandirian daerah, baik dalam hal keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri.

Retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dapat memberikan sumbangan yang sangat besar. Akan tetapi besar kecilnya sumbangan ini akan sangat bergantung pada kemampuan Daerah dalam mengelola mengelola pasar. Bukan hanya mengelola dalam arti memperoleh

retribusi yang sebesar-besarnya, akan tetapi lebih dari itu juga bagaimana memajukan pasar, karena pasar merupakan jantung perekonomian. Pengelolaan pasar yang baik dan terencana akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi Pemerintah daerah, yaitu diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), terutama pada sektor retribusi. Hal ini juga berimbas pada kebersihan dalam pelaksanaan Otonomi daerah secara optimal. Untuk dapat meningkatkan sumbangan hasil retribusi pasar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), tentu saja perlu dilakukan usaha yang sungguh- sungguh dari berbagai pihak yang terkait, terutama pihak yang secara langsung berhubungan dengan penarikan retribusi pasar, yaitu manajer pengelola pasar dan jajarannya yang bertugas mengelola dan menarik retribusi pasar. Motivasi petugas pengelola pasar tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Perlu adanya berbagai langkah konkrit yang dilakukan untuk membentuk suatu kinerja yang baik, seperti dengan berbagai bentuk pelatihan, pemberian insentif, pemberian penghargaan, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Dengan penyediaan fasilitas pasar, tempat ini sangat vital diperlukan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pasar merupakan salah satu yang potensial yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau lebih sering dikenal dengan retribusi pasar. Namun untuk mengoptimalkan pendapatan dari retribusi pasar perlu adanya pengelolaan pasar yang baik dari pihak pengelola pasar.

Untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar menjadi pemikiran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencari strategi dalam pengelolaan pasar sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dan maksimal bagi pendapatan asli daerah.

Guna mengatur strategi yang akan dirumuskan maka ditetapkan tugas pengelolaan pasar pada lembaga/instansi tertentu yang memiliki kompetensi. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggung jawab tersebut berada pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan khususnya Seksi Sarana dan Prasarana Pasar, Seksi Pembinaan dan Penataan, Seksi Ketertiban di Bidang Pengelolaan Pasar.

Teluk Kuantan mempunyai aset kios Pasar Rakyat Teluk Kuantan yang merupakan pasar terbesar sekabupaten Kuantan Singingi, Pelaksanaan Penyewaan Kios dan Pelataran Pasar Rakyat Teluk Kuantan didasarkan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penataan dan Penempatan Hak sewa Kios dan Pelataran Pedagang Pasar Rakyat Teluk Kuantan. Nilai sewa kios per-tahunnya senilai Rp 1.200.000 namun di bayar sekali enam bulan senilai Rp 600.000. Jumlah kios Pasar Rakyat Teluk Kuantan adalah 402 kios. Namun masih banyak terdapat kios yang kosong pada tiap lantai dimasing-masing blok yaitu sebanyak 87 kios (*Data Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi pada february tahun 2012*). Pada lantai III blok B dan blok C Bahkan tidak ada pedagang yang menyewa kios, ini dikarenakan prinsip pedagang yang akan memilih tempat yang lebih ramai di banding tempat yang belum ada pedagangnya sama sekali.

Besarnya target retribusi kios diukur berdasarkan jumlah kios pasar rakyat Teluk Kuantan, Jika nilai sewa per-tahun tiap kios senilai Rp 1.200.000, maka jika dikalikan jumlah kios sebanyak 402 kios, maka nilai target retribusi pasar rakyat Teluk Kuantan pertahunnya senilai Rp 482.400.000. Dengan banyaknya kios yang kosong yaitu sebanyak 87 kios, berarti kios yang terisi sebanyak 315 kios. Maka realisasi terhadap target retribusi pasar rakyat Teluk Kuantan yaitu senilai Rp 378.000.000 pertahunnya. Ini tentu belum mencapai dari target yang ditetapkan oleh dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasar Rakyat Teluk Kuantan seharusnya bisa menjadi potensi yang besar bagi Kabupaten Kuantan Singingi. Pembangunan pasar ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan nantinya dapat digali sebagai pemasukan pemerintah dari sektor retribusi. Serta sebagai wujud upaya kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat khususnya pedagang. Hal ini menjadi pemikiran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencari strategi dalam upaya meningkatkan pengelolaan pasar rakyat Teluk Kuantan guna tercapainya target retribusi sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dan maksimal bagi pendapatan asli daerah.

Untuk merumuskan strategi pengelolaan pasar, penulis menggunakan teori manajemen strategis yang dikembangkan oleh Bryson. Dengan mengetahui gejala-gejala yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal organisasi, kemudian menganalisis tiap aspek pada lingkungan internal dan eksternal tersebut maka akan diidentifikasi suatu isu strategis. Dengan data yang telah diperoleh tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Dari hasil temuan yang diperoleh kemudian dilakukan analisis untuk memastikan temuan *Confirming Finding Analysis*, yakni suatu analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian dan memastikan kebenaran temuan di dalam penelitian kualitatif, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memastikan temuan antara lain adalah teknik Triangulasi yang menurut Miles (1994:234) merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran dengan jalan mencocokkan dengan informasi dari sumber-sumber lain dari sumber pertama. Dengan demikian teknik Triangulasi dilakukan untuk mencari kebenaran sumber untuk kemudian dilakukan konfirmasi untuk memperoleh data yang benar-benar valid. Penulis menggunakan matrik SWOT dalam memformulasikan strategi ini. Dengan menggunakan matriks ini didapatkan empat variasi strategi yaitu: menggunakan kekuatan untuk menangkap kesempatan, mengatasi kelemahan dengan mengambil kesempatan, menggunakan kekuatan untuk menghindarkan ancaman dan meminimalkan kelemahan serta menghindarkan ancaman.

Dengan mengetahui isu strategis di lingkungan internal dan eksternal Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan maka akan disusun suatu strategi dalam pengelolaan pasar rakyat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya pengelolaan Pasar Rakyat Teluk Kuantan dan penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan merumuskan strategi dalam upaya meningkatkan pengelolaan pasar .

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Lingkungan Internal**

#### **1. Analisis Kekuatan (*Strength*) Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Pasar Rakyat Teluk Kuantan.**

Sumber daya (personel) yang dimiliki oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan terutama Bidang Pasar secara kualitas sudah baik, ini merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. Sumber Daya Manusia yang baik akan berpotensi untuk mengoptimalkan tugas-tugas pengelolaan pasar kearah yang lebih baik.

Pada aspek keuangan, yaitu kemampuan dalam menyediakan anggaran bagi kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat Teluk Kuantan. Kekuatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menentukan biaya pengelolaan pasar karena berdasarkan atas kebutuhan yang diajukan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi,

Pada aspek sarana informasi dan teknologi, dengan sarana informasi dan teknologi yang memadai, ini akan berdampak baik pada pelaksanaan tugas pegawai, karena dengan adanya sarana dan teknologi yang memadai akan mempermudah pegawai baik dalam tugas pelayanan maupun tugas dalam upaya pengelolaan pasar yang lebih baik.

Kejelasan mandat dan misi organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Pasar, kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi. Ini merupakan kekuatan organisasi karena secara jelas disebutkan kewenangan untuk mengelola pasar, sehingga untuk mengembangkan strategi dalam melakukan pengelolaan pasar memiliki arah dan pedoman yang jelas.

Dengan struktur organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2008, dimana pembagian tugas dalam struktur organisasi dilakukan

dengan lebih mengutamakan fungsi masing-masing seksi organisasi. Dengan ini akan menghindari adanya konsentrasi berlebih pada pekerjaan satu seksi dan dapat lebih meningkatkan dan mempermudah melakukan perencanaan terhadap masing-masing tugas.

## **2. Analisis Kelemahan (*Weakness*) Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Pasar Rakyat Teluk Kuantan.**

Kompetensi (kecakapan dan Keahlian) pegawai dirasa belum terlihat dikarenakan program dan upaya yang dikembangkan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi selama ini, bersifat rutin dan cenderung mengulang apa yang ada sebelumnya tidak inovatif dan cenderung reaktif.

Kurangnya langkah strategis yang dilakukan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengatasi persoalan Pasar Rakyat Teluk Kuantan membuat kebijakan dan program yang dibuat Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan belum terwujud. Perlu adanya langkah khusus untuk menjadikan Pasar Rakyat Teluk Kuantan sebagai sistem ekonomi kerakyatan.

Belum adanya standar yang mengatur membuat prosedur pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan akan sulit mengetahui tiap fenomena yang terjadi untuk mencari strategi terciptanya pasar yang lebih baik lagi.

Belum optimalnya kinerja Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan efisiensi dan efektifitas penggunaan biaya pengelolaan dengan realisasi pendapatan retribusi Pasar Rakyat Teluk Kuantan.

## **B. Analisis Lingkungan Eksternal**

### **3. Analisis Peluang (*Opportunity*) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Pasar Rakyat Teluk Kuantan.**

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada daerah untuk menggali tiap potensi yang ada. Dengan adanya Perda Nomor 04 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan diharapkan mampu menggali potensi Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi.

Keputusan Bupati Kuantan Singingi No. 312 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyerahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kepada Camat sekabupaten Kuantan Singingi membuat rentang kendali pengelolaan lebih kecil sehingga diharapkan pengelolaan akan lebih efektif.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan berdampak pada daya beli masyarakat sehingga akan mendukung dalam usaha pemerintah dalam menggerakkan seluruh sektor ekonomi dalam memanfaatkan segala potensi sumber daya ekonomi dan sumber daya manusianya. Ini akan memberikan dampak yang baik bagi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam upaya mencari strategi pengelolaan pasar.

Keberadaan Pasar Rakyat yang berada pada daerah yang paling padat penduduknya dalam wilayah Kuantan Singingi. Dengan jumlah penduduk untuk kecamatan kuantan tengah yang merupakan pusat kota Teluk Kuantan akan mempengaruhi ramainya pengunjung Pasar Rakyat Teluk Kuantan.

Dengan kelengkapan fasilitas pasar yang disediakan akan menjadi peluang tersendiri dalam menarik minat pedagang untuk menyewa kios Pasar Rakyat Teluk Kuantan.

#### **4. Analisis Tantangan (*Threats*) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Pasar Rakyat Teluk Kuantan.**

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2008 tentang penetapan harga dan prosedur pembayaran retribusi Pasar Rakyat Teluk Kuantan dimana pembayaran dilakukan tiap enam bulan sekali.

Rendahnya penegakan hukum yang ada di Pasar Rakyat Teluk Kuantan terutama dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan wajib retribusi belum optimal, karena dikhawatirkan menjadi ancaman dan berdampak buruk terhadap pengelolaan Pasar Rakyat Teluk Kuantan.

Rendahnya penegakan hukum berdampak pada ketidaktaatannya pedagang dalam membayar retribusi pasar.

## **KESIMPULAN**

Dari analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kinerja Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam melakukan pengelolaan pasar rakyat Teluk Kuantan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan efektifitas pengelolaan retribusi pasar, dengan membandingkan pendapatan retribusi pasar dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk pengelolaan Pasar Rakyat Teluk Kuantan dalam jangka waktu satu tahun.

Rendahnya kecakapan dan keahlian yang dimiliki pegawai Bidang Pasar Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya langkah kreatif dalam hal pengelolaan Pasar Rakyat Teluk Kuantan, karena bekerja yang sifatnya hanya bersifat rutinitas hal inilah yang membuat belum adanya langkah strategis dalam hal pengelolaan pasar.

Masih kurangnya langkah strategis dalam hal mengatasi masih banyaknya kios yang kosong, banyaknya kios yang kosong merupakan penyebab tidak optimalnya pengelolaan Pasar Rakyat Teluk Kuantan dilihat dari pendapatan retribusinya

Belum jelasnya prosedur pengawasan di lingkungan Pasar Rakyat Teluk Kuantan sehingga mempengaruhi kinerja organisasi dalam hal pengelolaan dan upaya optimalisasi penerimaan retribusi pasar.

Masih rendahnya penegakan hukum sehingga berpengaruh terhadap upaya pencapaian organisasi. Selama ini setiap permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pedagang belum ada sanksi yang tegas yang diberikan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. Misalnya bila ada pedagang menunggak sewa bulanan maka pedagang sulit menindak, karena sanksi tidak di dukung dengan aturan yang jelas.

## **SARAN**

Untuk menanggapi isu-isu strategis, guna meningkatkan kinerja Dinas Pasar dalam optimalisasi pengelolaan Pasar Rakyat Teluk Kuantan, maka berikut akan disarankan terhadap masing-masing strategis:

Bagaimana meningkatkan kompetensi pegawai Bidang Pasar Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya mewujudkan misi organisasi baik dalam pelayanan dan pengelolaan maupun peningkatan penerimaan retribusi Pasar Rakyat Teluk Kuantan diperlukan strategi yang tepat antara lain: a. Peningkatan kualitas dan keterampilan pegawai Bidang Pasar Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan melalui jalur pendidikan maupun dengan berbagai pelatihan dan kursus. b. Memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi. c. Upaya sosialisasi tentang misi organisasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi oleh pihak manajemen kepada semua aparat di lingkungan Pasar Rakyat Teluk Kuantan perlu dilakukan untuk memperoleh kesatuan gerak dan persepsi. d. Penerapan disiplin kerja serta pengamalan dan penanaman metode pelaksanaan tugas efektif dan efisien.

Dalam hal untuk menambah variasi strategi yang dapat dilakukan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas strategi yang sudah ada, seperti memasang iklan tidak hanya dengan iklan diradio dan pamflet saja, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan juga bisa memanfaatkan sarana informasi yang lain seperti memasang iklan diinternet bahkan televisi dan media cetak seperti koran, sehingga informasi tentang promosi pasar lebih tersebar luas. b. Menjalani kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Pariwisata, hal ini dimaksud untuk menjadikan Pasar Rakyat Teluk Kuantan sebagai pasar pariwisata sehingga dapat menarik banyak pengunjung. c. Mempromosikan pasar keluar daerah, jika memang masyarakat lokal tidak begitu besar minatnya untuk berdagang, tidak ada salahnya mengundang pedagang dari luar daerah.

Untuk melakukan pengawasan terhadap Pasar Rakyat Teluk Kuantan dapat ditempuh dengan berbagai cara sebagai berikut. a. Menjadikan optimalisasi Pasar Rakyat Teluk Kuantan sebagai program tetap organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. b. Menjelaskan secara rinci akan tugas pada masing-masing staf sesuai dengan prosedur yang ada. c. Diberikan kewenangan kepada atasan untuk menilai stafnya dan memberikan sanksi bila memang perlu.

Upaya untuk penegakan hukum dan menyikapi perilaku masyarakat wajib retribusi dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut: a. Penyuluhan terhadap pedagang akan hak dan kewajibannya, dengan pendekatan persuasif pedagang diberikan penyuluhan karena dengan penyuluhan akan dapat menumbuhkan kesadaran pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi. Melalui penyuluhan dan sosialisasi secara intensif, karena dengan penyuluhan dapat memberikan informasi yang benar dan jelas kepada wajib retribusi yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran untuk membayar retribusi bagi pengguna jasa dan fasilitas di pasar. b. Secara berkala dijelaskan ulang tentang besarnya tarif yang harus dibayar oleh pedagang sesuai perda yang ada. c. Pendekatan repretif, pedagang yang melanggar aturan akan diberi sanksi yang tegas agar menjadi contoh yang kurang baik bagi pedagang lainnya. d. Sikap dan tindakan pemungut harus baik, berdisiplin tinggi, ramah dan selalu memberikan pelayanan yang prima kepada pedagang atau wajib retribusi. e. Mengkaji kembali peraturan yang ada apakah telah mendukung optimalisasi pengelolaan pasar dan sanksi pelanggaran wajib retribusi, sehingga nantinya pedagang diberikan kemudahan prosedur pembayaran dan adanya kejelasan sanksi yang mengatur jika terjadi pelanggaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bryson, John M., 2002, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Terjemahan Miftahudri M., Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rangkuti, Fredy. 2002. *Analisis SWOT, Teknik Membedak Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Rencana Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Grasindo Pustaka Utama. Jakarta.
- Salusu, J. 2000. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sri Wahyudi, Agustinus, 1996, *Managemen Strategik: Pengantar Proses Berfikir Strategik*, Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2008 tentang penataan dan penempatan hak sewa kios dan pelataran pedagang pasar rakyat Teluk Kuantan.